



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RAPAT KERJA KOMISI VI DPRRI DENGAN MENTERI INVESTASI/
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)**

- Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : V
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 8 Juni 2021
Waktu : 14.00 s.d. 16.21 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPRRI Gedung Nusantara I Lt.1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat : I Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P/ WK. KETUA/ F-P.GOLKAR
Acara : Pembahasan RKP dan RKA/KL Tahun 2022
Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabag Sekretariat Komisi VI DPRRI
Hadir : A. Anggota DPRRI:
37 dari 54 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
8 dari 12 orang Anggota
1. Adisatrya Surya Sulisto
2. Muhammad Prakosa
3. Darmadi Duriyanto (Matriks)
4. Rieke Diah Pitaloka
5. Sonny T. Danaparamita
6. I Nyoman Parta, S.H.
7. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A.
8. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
7 dari 8 orang Anggota
1. I Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P
2. Ir. H.M. Idris Laena, M.H.
3. Drs. Mukhtarudin
4. H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
5. Doni Akbar, S.E.
6. Trifena M. Tinal, B.Sc.
7. Nusron Wahid
3. FRAKSI PARTAI GERINDRA

(F-GERINDRA)

6 dari 7 orang Anggota

1. Mohamad Hekal, M.B.A.
2. Andre Rosiade
3. Khilmi
4. Ir. H. La Tinro La Tunrung
5. M. Husein Fadlulloh, S.Bus., M.M.
M.B.A.
6. Hendrik Lewerissa, S.H., L.L.M

4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)

4 dari 5 orang Anggota

1. Nyat Kadir
2. H. Subardi, S.H., M.H.
3. Zuristyo Firmadata, S.E., M.M.
4. Muhammad Rapsel Ali

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA (F-PKB)

4 dari 6 orang Anggota

1. Ir. H. M. Nasim Khan
2. Tommy Kurniawan
3. Drs. H. Mohammad Toha, S.Sos.,
M.Si.
4. Siti Mukaromah, S.Ag., M.A.P

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

3 dari 5 orang Anggota

1. DR. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si.
2. Muhammad Dhevy Bijak
3. Hj. Melani Leimena Suharli

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA (F-PKS)

3 dari 4 orang Anggota

1. Amin, AK., M.M.
2. Hj. Nevi Zuairina
3. Rafli

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
(F-PAN)

2 dari 5 orang Anggota

1. Abdul Hakim Bafagih
2. Daeng Muhammad, S.E., M.Si.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F-PPP)

0 dari 2 orang Anggota

1. -

B. UNDANGAN

1. Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
2. Undangan lainnya

JALANNYA RAPAT:

F-PG (NUSRON WAHID):

Saya setuju, saya sudah setuju anggaran ini sebelum dirapatkan sudah setuju.

KETUA RAPAT / F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):

Gitu ya. Oke, Pak Menteri kita mulai Pak Menteri ya.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Syalom,
Om Swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI,
Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Bahlil Lahadalia, Menteri, wah Menteri, luar biasa ini. Menteri Investasi atau Kepala BKPM beserta jajarannya,**

Ini katanya masih kepakai nggak Pak Menteri? Menteri Investasi-Kepala BKPM, Kepala BKPM masih tetap dipakai?

MENTERI BKPM/KEPALA BKPM:

Masih, karena honornya masih.

KETUA RAPAT:

Puja puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga, kita dapat melaksanakan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi atau Kepala BKPM pada hari ini dalam keadaan sehat *wal afiat* serta terhindar dari wabah Covid 19.

Sehubungan dengan kondisi yang tidak kondusif saat ini, terkait dengan penyebaran Covid-19 bahwa rapat-rapat yang dilakukan oleh alat kelengkapan dewan (AKD) dan mitra kerja pemerintah dilakukan dengan ketentuan antara lain:

1. Berdasarkan Pasal 226 Ayat 3 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib berbunyi, semua jenis rapat DPR dilakukan

di gedung DPR kecuali ditentukan lain. Rapat dapat dilakukan di luar gedung DPR atas persetujuan Pimpinan DPR. Maka, pelaksanaan rapat dapat dilakukan secara tatap muka dan atau secara virtual.

2. Peliputan pelaksanaan rapat Komisi VI DPR dilakukan *live streaming* oleh TV Parlemen, media cetak dan media elektronik lainnya mendapatkan sumber berita dari TV Parlemen.
3. Berdasarkan Pasal 249 Ayat 1 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib menyebutkan bahwa untuk kepentingan administrasi setiap anggota menandatangani daftar hadir sebelum menghadiri rapat. Dikarenakan kondisi tidak kondusif, maka daftar hadir anggota dapat dilakukan secara elektronik. Kehadiran anggota tercatat dalam *list* partisipasi dalam aplikasi Zoom.
4. Rapat dihadiri paling banyak 20% dari jumlah Anggota Komisi serta mitra kerja dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. Pendamping mitra kerja berjumlah maksimum 5 orang dan ditempatkan di balkon ruang rapat Komisi.
 - b. Pendamping dari mitra kerja yang tidak berhubungan langsung dengan rapat dan tidak berdamping, tertampung di balkon untuk meninggalkan gedung DPRRI.
 - c. Pendamping dari mitra kerja yang tidak tertampung di ruang rapat maupun balkon dapat mengikuti rapat secara virtual.
 - d. Pendamping dari anggota, tenaga ahli, staff administrasi anggota untuk tidak mendampingi anggotanya ke komisi.

Selanjutnya, berdasarkan surat dari Ketua DPRRI Nomor PW-10736 DPRRI/R-9 2020, tanggal 11 September 2020 tentang pembatasan kehadiran fisik pada rapat-rapat, kami meminta kesepakatan mengenai tata cara rapat yang dilakukan sebagai berikut:

1. Kegiatan rapat-rapat di komisi dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat.
2. Lamanya pelaksanaan dapat disepakati pada saat pembukaan rapat agar lebih efisien dan efektif, maksimum dua setengah jam.
3. Alur rapat sebagai berikut: pembukaan, presentasi singkat oleh kementerian dan lembaga-instansi, terus kemudian pertanyaan anggota, tanggapan kementerian dan lembaga-instansi, tanggapan balik anggota, tanggapan akhir kementerian dan lembaga-instansi dan kesimpulan penutup.
4. Presentasi awal diberikan waktu 5 menit, tanggapan pertama 10 menit dan tanggapan akhir 10 menit. Anggota diberikan waktu menyampaikan pertanyaan selama 3 menit dan tanggapan balik selama 3 menit. Lalu lintas rapat diatur oleh admin yang membantu

pimpinan rapat terutama dalam menghidupkan dan mematikan *microphone* masing-masing peserta.

Bapak Ibu yang kami muliakan,

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VI DPRRI, rapat kerja hari ini telah dihadiri dan ditandatangani oleh 24 orang dari 54 Anggota Komisi VI DPRRI yang terdiri atas 8 fraksi. Dengan demikian kourum telah dipenuhi, terpenuhi sebagaimana dalam Pasal 281 Ayat 1 Peraturan DPR RI Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Maka, perkenankan kami membuka rapat kerja pada hari ini dan rapat saya nyatakan terbuka untuk umum. Setuju ya.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.50 WIB)

Terima kasih, kami ucapkan kepada Pak Menteri Investasi-Kepala BKPM atas kesediaan waktunya untuk menghadiri rapat kerja pada hari ini dalam rangka pembahasan RKP K/L dan RKA K/L tahun 2022 Kementerian Investasi/BKPM.

Bapak Ibu dan hadirin yang kami muliakan.

Sebagaimana kita ketahui tata cara pelaksanaan tugas komisi dalam bidang anggaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 259 Ayat 2 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib antara lain adalah mengadakan pembicaraan pendahuluan rancangan APBN yang meliputi rencana kerja pemerintah, serta rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga dalam ruang lingkup tugas komisi dan usulan anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan pemerintah untuk disampaikan kepada Badan Anggaran DPRRI.

Perlu kami sampaikan bahwa Rapat Kerja Komisi VI DPRRI pada hari ini adalah sesuai dengan surat dari Pimpinan Badan Anggaran dengan Nomor AG/03981/DPRRI/III/2021 tanggal 23 Maret 2021, mengenai penyampaian rancangan jadwal pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2022 dan RKP tahun 2022 yang juga menjadwalkan rapat kerja komisi-komisi dengan mitra kerjanya antara lain, tanggal 2 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021. Untuk itu, kami juga ingin mendapatkan persetujuan apakah rapat kita pada hari ini bisa kita akhiri pada pukul 16.30-lah ya?

(RAPAT: SETUJU)

Setuju, Pak Hendrik ya. Pak Hendrik setuju kita ketok. Efisien dan efektif.

Selanjutnya, kami persilakan kepada Pak Menteri Investasi/Kepala BKPM untuknya menyampaikan penjelasan lebih lanjut sesuai dengan agenda rapat hari ini mengenai RKA dan RKP tahun 2020 Kementerian Investasi dan Kepala BKPM. Jadi, kita membahas RKA K/L, RKP pada 2022, Pak Menteri. Silakan, penjelasan, kami persilakan,

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM:

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

**Syalom,
Om Swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,**

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VI DPRRI, Pak Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P. yang penting, *detail*-nya semua harus saya sampaikan agar tidak salah.

Bapak Ibu Anggota dewan DPRRI Komisi VI yang kami hormati,

Dan seizin Bapak Ibu Pimpinan, saya didampingi oleh Bapak-bapak Eselon I dari Kementerian Investasi,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Mahakuasa atas limpahan rahmat kasih sayang-Nya, sehingga pada sore hari ini sekalipun dalam keadaan Covid-19 kita masih tetap diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Mahakuasa.

Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota dewan yang kami hormati,

Karena, sudah dijelaskan tadi tata tertib penyampaian pemaparan 5 menit, maka saya akan mempergunakan 5 menit ini sebaik-baiknya.

Yang pertama Pimpinan, kami laporkan bahwa sesuai berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif Nomor S361MK.02/2001 dan B238/MPPN/D.8/PP0402/04/2021 tanggal 9 April 2001, perihal tentang Pagu Indikatif Kementerian Lembaga Tahun 2022. Kami di Kementerian Investasi mendapatkan plafon sementara sebesar Rp711.513.546.000,-. Kemudian, kami bagi Pimpinan, di dalam program. Program dukungan manajemen sebesar Rp300.901.232.000,-. Kemudian, belanja program itu sebesar Rp410.612.314.000,-

Pimpinan yang kami hormati.

Rapat-rapat sebelumnya juga kami sudah melaporkan tentang KPI kami di BKPM di Kementerian Investasi yang awalnya 6 KPI, sekarang menambah satu tentang pengembangan hilirisasi investasi sumber daya alam. Yang lainnya masih *alhamdulillah* seperti sama yang kemarin-kemarin Pimpinan. Kami juga melaporkan Pimpinan, target realisasi investasi di 2021 dengan anggaran sebesar 930 miliar, Pimpinan. Jadi, dulu di 2021 kami mendapat plafon 1 triliun 35 miliar, kemudian *refocusing* menjadi 930 miliar target investasi kita dalam RPJP, RPJM itu 858,5 triliun. Namun, arahan

Bapak Presiden itu menjadi 900 triliun dan *insya* Allah 2021, Pimpinan dengan segala upaya daya akan bisa kita wujudkan dengan kerja keras.

Kemudian Pimpinan, pada tahun 2022 kita dikasih target ini naiknya 30%, Pimpinan. Kalau dalam RPJM itu 968,4 triliun. Tetapi, arahan Bapak Presiden kepada kami itu harus mencapai 1.100 sampai 1.200 triliun untuk bisa pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%. Karena, pertumbuhan ekonomi nasional kita itu kontribusinya paling besar itulah konsumsi 57 sampai 60%, selebihnya adalah investasi kita 30%. Namun, karena grafik konsumsinya sudah agak *stuck* bahkan cenderung menurun akibat daya beli, maka yang dipompa adalah investasi. Jadi, investasi kita harus dongkrak Pimpinan. Jadi, naiknya kurang lebih sekitar 22 sampai 33%.

Kemudian, kegiatan prioritas Kementerian Investasi BKPM Tahun 2022, yang pertama adalah peningkatan IODB kita Pimpinan, arahan sekarang urutan ke-73, kan perlu melaporkan kepada Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat bahwa sejak tahun 2020, sejak tahun 2020 World Bank tidak mengeluarkan pengumuman terhadap hasil ranking dari kemudahan berusaha. Karena, saya pikir Pimpinan jujur aja kita pikir di World Bank ini juga sudah baik-baik semua, ternyata masih ada *quote and quote* ada potensi yang kemudian menjadi penghambat, sehingga tidak diumumkan.

Jadi, cara-cara kita tahun 99, tahun tahun tahun 2010 masih terjadi ternyata di sana, Pimpinan. Oleh karena itu, ODB kita kita targetkan di peringkat 40 sampai 50, kemudian pencapaian investasi realisasi sebesar 1.100 sampai 1.200, kemudian pengembangan OSS yang berbasis risiko sebagai implementasi dari pada Undang-Undang Cipta Kerja, Pimpinan dan sekarang sudah tahap finalisasi, kemudian fasilitas-fasilitas lokasi perusahaan, perusahaan asing ke Indonesia termasuk di dalamnya adalah pengusaha dalam negeri juga, pembuatan *roadmap* hilirisasi investasi yang berbasis pada sumber daya alam untuk sektor-sektor hilirisasinya, kemudian pembentukan satgas percepatan investasi. Ini bukan pembentukan, tetapi implementasi sesuai dengan Keppres Nomor 11 Tahun 2021.

Kemudian, penilaian kinerja PTSP dan percepatan pelaksanaan berusaha pada kementerian lembaga. Ini berdasarkan Perpres 42. Kemudian, melakukan penyusunan peta potensi investasi dalam bentuk pra FS, ini arahan dari pimpinan Komisi VI dan Bapak Ibu Anggota Dewan Komisi VI yang kemarin, tahun kemarin sudah selesai 23 provinsi.

Izin pimpinan, yang kemarin 23 proyek pra FS sudah kita serahkan ke sekretariat DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban institusional kami kepada DPR.

Yang berikut, dalam mendorong investasi besar untuk bermitra dengan UMKM.

Bapak Pimpinan yang kami hormati,

Kami jujur aja, tadi saya di awal sampaikan bahwa anggaran kita 930 miliar, itu target yang dikasih oleh Bapak Presiden 900 triliun. Tetapi, begitu naik 1.100 sampai 1.200 anggaran kita turun, Pimpinan. Jadi, ini masih masih badan, itu antara kita tinggi Pimpinan, tapi begitu naik Kementerian anggarannya diturunkan. Nah, ini saya juga bingung Pimpinan. Tapi, itulah memang nasib sebagai abdi negara yang begini, Pimpinan. Tapi ya, mau ke mana lagi kita bercurhat kalau tidak kepemimpinan dan karena itu, Pimpinan kami mengajukan usulan tambahan sebesar 608 miliar, eh 608,5 miliar. Surat ini sudah kami ajukan kepada Menteri Keuangan, kemudian kami juga sudah menyampaikan kepada Menteri Bappenas, kami juga sudah melaporkan secara seksama, tinggal hari ini kami laporkan kepada Pimpinan. Besar harapan kami dan doa, zikir serta pergumulan dari seluruh Pimpinan dan para pejabat maupun karyawan di Kementerian Investasi, surat ini kiranya dapat dipahami dan dapat diperjuangkan oleh Pimpinan, Bapak Ibu Anggota Komisi VI.

Demikian sebagai pengantar, mudah-mudahan tidak lewat panjang Pimpinan. Terima kasih. Apabila ada yang kurang jelas, kami dengan senang hati untuk siap menerima penjelasan atau memberi penjelasan tambahan. Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaiikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ini benar juga, Pak Nusron rupanya. Kita belum lihat angkanya sudah langsung setuju. Sama saya apalagi lihat angka beginian. Sampai penambahannya pun saya setuju ya.

Silakan, ini Mbah Bardi. Ya, Mbah Bardi karena Pak Menteri sangat efektif, efisien juga tadi 3 menit. Ya, kita juga harus efisien efektif juga.

F-PG (Ir. H.M. IDRIS LAENA, M.H.):

Kabar kabar. Pak Dammer, apa kabar?

KETUA RAPAT:

Siapa itu? Oh.

F-PG (Ir. H.M. IDRIS LAENA, M.H.):

Idris Leana.

KETUA RAPAT:

Pak Idris di mobil katanya mendaftar, oke.

F-PG (Ir. H.M. IDRIS LAENA, M.H.):

Iya.

F-P.NASDEM (H. SUBARDI, S.H., M.H.):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Menteri dan jajarannya yang kami hormati,

Langsung, karena waktunya dibatasi dan saya hanya tanya satu pertanyaan. Jadi, dengan adanya Kementerian Investasi dan BKPM menjadi satu. Tentunya, ini kewenangan secara nasional, termasuk pelaku-pelaku yang ada di daerah yaitu kabupaten, kota dan provinsi. Dalam rangka untuk mengembangkan investasi dan melayani investor-investor yang masuk.

Nah, saya ingin ada *case* ya, ada persoalan di daerah saya. Saya ini, Pak Menteri dari Jogja, *double E Y*. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri lagi soal yang disampaikan oleh Pak Ketua. Ya, saya prinsipnya kami nggak masalah itu ya. Setujulah intinya. Tapi, ada poin-poin yang tentunya kami *stressing* kan yaitu, ada usaha tambahan tapi untuk peruntukannya tambahan anggaran untuk mengakomodasi kegiatan, khususnya di nomor 3 ya, adanya pembentukan satgas investasi. Ini nanti seperti apa satgas itu. Apakah memantau apa namanya kinerja sampai dengan kabupaten, kota, provinsi. Apakah hanya di satgas di tingkat nasional. Kemudian, karena apa, ini akan sangat penting ketika satgas itu bisa nyentuh pada kabupaten kota.

Kemudian yang berikutnya, di nomor 8 itu penetapan penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu, dan percepatan pelaksanaan berusaha pemerintah daerah serta percepatan pelaksanaan berusaha kementerian dan lembaga.

Yang berikutnya adalah konsentrasi ini, pelayanan perizinan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM.

Nah, berikutnya yang keempat, adalah penguatan pengawasan atau pemeriksaan terhadap pelaksanaan kinerja kelembagaan. Kalau tidak salah, konotasinya ini lembaga, ini kelembagaan yang ada di daerah fungsinya atau yang kelabakan yang di mana ini.

Nah, *case* nya adalah saya dari Jogja itu salah satu kabupaten di Sleman itu pasarnya cukup besar. Cuma persoalannya adalah masih budaya lama, yang namanya izin UMKM aja terus pengusaha kecil itu masih harus berbulan-bulan. Karena apa, dari mulai izin apa namanya itu, umpamanya hanya buka agen LPG umpamanya, contoh aja. Itu harus minta itu namanya IPPT. Bupati harus, Bupati sendiri harus tanda tangan, izin pemanfaatan tanah, setelah itu baru proses IMB dan macam-macamnya, dan itu semua pintu ada Bapedda, lingkungan hidup, semua harus memberikan

rekomendasi. Ini kapan bisa selesai ya? Tugas Pak Menteri, kalau di daerah seperti itu.

Nah, oleh karena itu, mohon apa nanti penjelasan Pak Menteri ada tindak lanjut ya pada daerah-daerah bagaimana, apakah satgas, apa penguatan pengawasan. Sehingga, masing-masing daerah itu juga sinkron dengan kebijakan di pusat, kebijakan presiden, dalam rangka penguatan investasi. Ada daya tarik investasi yang cukup kuat ya. Sehingga, tidak lagi nama izin itu sudah satu atap, tapi masih harus nunggu 6 bulan, 3 bulan bahkan ada 1 tahun. Kapan investasi, dia lari dong investasinya.

Nah, inilah Pak Menteri. Mohon nanti penjelasan dan tindak lanjut berikutnya, nanti cek aja di Kabupaten Sleman apa itu. Kasihan itu pengusaha di sana.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam.

Bu Evita sudah siap? Udah.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Bapak Menteri dan jajaran yang saya hormati.

Terima kasih atas laporan singkatnya yang diberikan. Namun, ada berapa pendalaman yang ingin saya tanyakan Pak Menteri. Halaman 5, Pak Menteri.

Di sini kan Bapak sudah menyampaikan tadi bahwa target realisasi investasi tahun 2022 judulnya. Tahun 2021 boleh dikatakan kita *achieve* target kan begitu Pak. Nah, realisasi tahun 2022 sepertinya kalau melihat capaian di tahun 2021 *probably archive* target. Kalau agak perbaiki dampak Covid ini setengah tahun ini lebih, lebih membaik.

Pertanyaan saya sebenarnya cuman satu, Pak. Investasi ini saya tidak melihat berapa sih sebenarnya yang penanaman modal asing, berapa yang penanaman modal dalam negeri. Saya pengen tahu, Pak. Begitu juga dengan realisasinya, ya kan, yang banyak ini penanaman modal dari mana sih begitu, dan kita juga pengen tahu sebenarnya negara-negara mana saja sih kalau dari bacaan kan kita tahu Pak, investasi kita masih yang terbesar itu dari Singapur. Nah, Singapur ini kan juga menjadi pertanyaan kita. *Government-nyakah yang invest, private sector-nyakah* atau orang kita invest ke kita, kan ini juga menjadi pertanyaannya ya kan.

Yang kedua Cina, yang ketiga Korea Selatan. Nah, tapi Korea Selatan saya baca-baca, Pak sekarang mereka mengarah jangan sampai mereka berpindah ke Malaysia. Karena, mereka saya baca-baca menanamkan modal di beberapa sektor itu yang cukup besar di Malaysia. Jadi, Bapak ke depan memang namanya *road show-road show* ke luar, terutama ke negara kalau saya katakan sih Korea Selatan dan Jepang ya Pak, itu perlu lobi-lobi itu perlu dilakukan agar investasi-investasi kita tidak, tidak diapa, tidak diambil oleh negara lain. Hongkong ini peringkatnya kan turun Pak, sebabnya mungkin apa politik dalam negeri mereka yang lagi goyang-goyang. Yang saya, yang saya heran itu Pak, Swiss itu yang kelima, iya kan. Yang saya tanya, negara-negara besar yang lain ke mana. Kita mau mengadakan hubungan kerja sama dengan Australia. Wah, Indonesian Australian *blablabla* yakan dengan Amerika, enggak terlihat dari *performance* investasi mereka di Indonesia. Nah ini, ini yang saya menjadi bagi saya itu menjadi pertanyaan, Pak Menteri.

Kemudian, bagus, ya kan tadi saya katakan realisasi kita saja kuartal 1 saja sudah cukup bagus, ya Pak ya. Kalau saya bacanya PMA kita naik, walaupun 0,6% tapi lihat di ininya di informasi yang diberikan itu cukup baik, ya Pak ya. Yang saya bingung 1, Pak. Kalau kita lagi kunker ke daerah-daerah kawasan industri atau bagaimana, mereka selalu mengeluh itu kosong, yakan. Sementara kan, *figure* investasi ini kan cukup bagus. Ini kesalahannya di mana Pak, di sini bagus tapi kawasan industri, daerah industri dan lain-lain itu informasi yang kita berikan itu masih kosong melompong kemana pun kita pergi Pak, ya kan ke daerah-daerah mana pun.

Kemudian di halaman 6, Pak. Kegiatan prioritas Kementerian Investasi tahun 2022. Sayangnya Bapak kan di sini hanya memberi bagan-bagan aja, poin-poin. Tapi, kita nggak tahu. Apa sih yang akan dilakukan oleh Kementerian Investasi, contohnya saja Bapak akan memfasilitasi relokasi perusahaan asing ke Indonesia. Apa yang akan Bapak lakukan dalam hal ini. Kita enggak tahu, Pak. Karena, Bapak cuma kasih poin-poinnya saja ya kan.

Kemudian, saya juga minta Pak kalau bisa itu penyusunan peta potensi investasi dalam bentuk *visibility* studi baru, tapi kalau ada potensi-potensinya itu saya juga pengen dapat *copy*-nya Pak, kalau bisa Pak.

Kemudian, mendorong investasi besar untuk bermitra dengan UMKM. Apa Pak yang dilakukan dalam hal ini untuk mendorong. Kita tahu BUMN. Kita tahu Kementerian BUMN sudah bikin peraturan, bahwa yang tender-tender yang sebanyak sekian itu UMKM, ya kan. Nah, cuman ini semuanya ini, ini kan masih aturan-aturan. Kita undang-undang investasi itu sudah lengkap, Bapak. Udah ada nggak Pak. Apakah masih perlu, apakah tidak diperlukan revisi dengan dinamika yang ada sekarang ini. Apakah sudah cukup. Apakah dengan penambahan-penambahan di Undang-Undang Cipta Kerja, ada apa ABC lembaga yang di lembaga investasi, apa segala macam itu apakah kita nggak nggak perlu ada melihat kembali undang-undang kita.

Kemudian, Pak mengenai pagu. Ya, kalau dipikir ya memang kecil juga ya dari BKPM dikasih tugas yang cukup berat, investasi tapi anggaran kalau

Bapak katakan tadi turun ya. Tapi, Bapak kenapa mintanya kecil? Yang berani *dong* mintanya. Kenapa cuman 608, kenapa nggak *go something big* begitu loh, tapi tentunya dengan argumentasi yang besar. Karena, apa pun suka nggak suka kita perlu investasi, kan begitu Pak.

Namun, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dengan Bapak. Tadi pak ini sudah mengatakan sebenarnya, Pak Subadri. Di yang lalu saya juga sudah tanya Pak Menteri, tapi Pak Menteri belum memberikan jawaban karena jawaban itu tertulis 10 hari, mengenai Satgas investasi. Apakah ini sama yang dengan yang Vietnam, Pak? Di Vietnam itu kan sekarang mereka lagi bikin yang namanya parlemen sama pemerintahannya ini Pak, membahas perlunya undang-undang investasi asing, mereka lagi bahas Pak di Vietnam. Mereka itu memasukkan perlindungan dan pertahanan nasional. Kenapa dia lakukan itu, banyak sekali Pak kejadian-kejadian bahwa PMA itu, investasi asing itu mengambil keuntungan dari investasinya.

Jadi, mereka itu dari celah hukumnya mereka bisa, bisa inilah belok-belok. Membeli tanah, tanah, tanah, tanah, memperluas area mereka padahal itu sebenarnya sangat penting wilayah itu bagi kepentingan pertahanan dan keamanan kita, Pak. Nah, ini mereka lagi bikin sekarang ini. Apakah kita itu terinspirasi dari situ atau bagaimana. Ya, banyaklah saya baca itu ada *Tin Capitalization* dan lain-lain.

Jadi, saya rasa saya juga pengen tahu Pak yang kita lakukan ini seperti dikatakan Bapak mengatakan, bahwa kementerian dan badan itu bedanya adalah Bapak mempunyai kewenangan diregulasi. Disini Bapak sudah sebutkan poin-poinnya yang akan Bapak lakukan, tapi *how* nya Bapak nggak jelas kan ke kita.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke. Ya lumayan, memang kalau perempuan itu suka yang panjang dan dalam jadi. Kita ke kanan, Pak Nusron.

F-PG (NUSRON WAHID):

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama, soal RKA K/L. Saya setuju, meskipun dengan kecewa karena pagunya turun. Anggaran ini sebelum di rapatkan pun saya sudah setuju anggaran ini. Jadi, saya tidak bertele-tele. Karena itu, termasuk juga dengan tambahan angka 608 miliar ini pun, saya setuju juga dengan catatan saya nitip satu program. Bukan, bukan, bukan, nggak ada kaitan sama dapil ini.

Bisnisnya BKPM itu kan hanya 2. Satu adalah membuat sistem, ya kan. Karena, bisnis layanan itu hanya 2. 2S, yang satu sistem yang satu

sinten. *Sinten* itu adalah SDM, orang. Sistem berarti itu menyangkut IT sama SOP, ya kan. Baik itu *back work*, *back work* nya maupun apa namanya depannya. Nah, SDM ini menyangkut *sinten*, berarti menyangkut orangnya.

Saya tidak pernah sepanjang saya duduk di komisi ini, karena bis BKPM itu bisnisnya layanan. Ada program penguatan *capacity building* SDM-nya itu dengan cara mengirimkan SDM terbaiknya sekolah ke luar negeri. Beda dengan BI, Kemkeu, OJK dan Bappenas. Karena, BKPM ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan Menteri Investasi ini sekarang ini kelasnya naik. Kalau dulu BKPM itu kelasnya setara dengan Kemenpora dan Kemendes serta Kemenaker bahkan dengan Kemensos, lirikan mata orang. Hari ini, Kementerian Investasi itu sudah setara dengan Bappenas, dengan Kemenkeu, dengan BI dan dengan OJK, kastanya naik. Hanya sayangnya, remunerasinya tidak naik, ya kan, tukinnya tidak naik. Karena, tukinnya yang tadi saya sebut itu udah 100%. Tukinnya BPKP, eh tukinnya Kementerian Investasi dan BKPM belum 100%. Kalau BI, OJK lebih tinggi lagi. Dia mempunyai nomenklatur sendiri, lebih tinggi daripada itu.

Karena itu, saya mendorong dua hal. Setuju, tunkin dinaikkan. Karena, kalau tunkin tidak dinaikkan potensi *default*, potensi *fraud*, potensi korupsi tinggi, karena bapak layanan. Terutama di dua tempat, tiga tempat. Yang pertama *dispute* potensi korupsi di perencanaan investasi, mana daerah yang dimasukan. Dari situ sudah lobang permainan. Yang kedua, *dispute* potensi korupsi di layanan investasi, di izin-izin, naik turun, tahan, kapan, semua itu saya tahu. Semua ada itunya tuh, ada seninya. Kemudian, yang nomor 3 adalah pengendalian investasi. Di tiga tempat ini paling krusial. Karena itu, saya usul SDM-nya ini disekolahkan, supaya naik. Kalau perlu Bahasa Inggrisnya pun TOEFL-nya harus minimal 600 yang ada di sini, di tiga tempat itu ke depan ini.

Saya kira itu, Pak Ketua. Tidak ada yang lain, Pak. Saya sudah setuju sebelum dirapatkan. Tapi, saya tidak setuju angkanya turun, cuma 700. Harus dikembalikan dan 600 ini juga wajib disetujui.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Inilah. Ini serba bisa. Jadi memang, karena dia sempat mengalami menjadi eksekutif dan sempat berpengalaman di legislatif plus kyai lagi, ya deh. Selesai kawan ini.

Silakan, Pak Amin.

F-PKS (AMIN AK, M.M.):

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Menteri sekaligus Pak Kepala, langsung ya. Jabatannya dua, Pak Menteri dan Pak Kepala.

Tadi, saya di pertemuan yang lalu pernah menyinggung apa yang disampaikan oleh Pak Ferdi. Ini kebetulan masukan memang dari konstituen dan relasi, Pak. Terkait dengan apa namanya masih lambatnya proses perizinan ya untuk mendirikan usaha-usaha yang. Ini kelasnya UMKM ya, kecil-kecil atau menengah lama. Ya, memang sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja dan kita pahami sekarang masa transisi ya. Ini betul, sekarang sedang terjadi bahkan untuk ya ini terjadi masih di sebuah kota, kota besarlah. Surabaya itu kan kota besar, Malang, terus mengurus perizinan itu bisa sampai 3 bulan, 4 bulan dan dengan biaya yang tinggi.

Nah, yang saya tanyakan lagi, mempertegas lagi apa yang disampaikan Pak Ferdi. Ini peran Keminves BKPM untuk mempercepat ini, bagaimana bisa segera apa namanya yang di Undang-Undang Ciptaker cepet terealisasi bagaimana perannya.

Kemudian yang kedua, ini dari bacaan saya Pak ya data nggak tau salah atau betul. Kan realisasi investasi 2020 itu hampir berimbang lah antara PMDN dan PMA. Tapi, sektor jasa nyatanya lebih dominan yang saya baca nih, Pak. Nah, ini apa namanya dari sisi tadi bidang kerja Pak Bahlil ini ada nggak sih apa namanya mau buat prioritas-prioritas dan membuat kanalisasi, mengarahkan investasi-investasi sebetulnya kesini penawarannya sektor ini, sektor ini. Salah satunya yang menurut saya peluangnya cukup besar kan dalam negeri ini kan sektor, salah satunya Pak sektor agro, Pak. Karena, impor kita di situ masih besar, masih tinggi impor gula, impor apa namanya bawang, impor garam dan sebagainya gitulah. Itu apa yang kedua. Apa tadi yang ketiga.

Ya, saya kira dua itu aja. Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh.

Ini *lawyer* Pak Hendrik Lewerissa.

F-P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

**Ibu dan Bapak yang saya hormati,
Pak Menteri Investasi dan seluruh jajaran Kementerian Investasi yang
saya hormati,**

**Selamat sore,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Syalom,
Salam sejaterah untuk kita semua,**

Pak Menteri, karena saya baru bertemu Bapak pertama kali pasca diangkat sebagai Menteri. Maka, sebagai adik-adik dari kawasan Indonesia Timur saya mau menyampaikan, “Selamat, Pak” dan apresiasi saya secara tidak langsung juga kepada Pak Presiden Jokowi yang mempercayakan posisi itu ditempati oleh salah satu putra terbaik Indonesia dari bagian timur Indonesia.

Sebenarnya, substansi pertanyaan saya tadi sudah di-*address* oleh senior saya, Pak Gus Nusron tadi. Ya, itu sebenarnya substansi pertanyaan saya, Pak. Sistem dan sumber daya manusia yang harus disiapkan. Tapi, ada satu lagi yang mungkin saya merasa penting untuk disampaikan kepada Pak Menteri, adalah ini kan Pak Menteri juga dibebani dengan target realisasi investasi oleh Pimpinan Pak Menteri, yaitu Pak Presiden. Saya percaya kultur ini tidak ada di dalam karakter personalitas Pak Menteri.

Tapi, sebagai orang Melayu, sebagai orang Indonesia, saya juga merasakan hal yang sama. Saya harus bilang bahwa kultur kita ini kan kultur menyenangkan hati pimpinan juga, Pak. Saya ambil analogi cerita misalnya, kalau ada pejabat yang mau mancing di kolam, rame-rame kita isi ikan di kolam itu banyak-banyak. Bila perlu kita menggunakan kekuatan supranatural, kekuatan dukun untuk mendatangkan ikan sebanyak pesisir pantai atau terumbu karang biar Pimpinan kita kalau mancing puas dia, Pak. Ada Pak ada Pak. Ada, pasar ikan juga ada, Pak.

Tapi, saya yakin itu kultur itu tidak dimiliki oleh Pak Menteri, karena Pak Menteri dan saya sama. Kita berasal dari 1 kultur yang sama. Kita bicara apa adanya saja pak, suka suka, nggak suka nggak suka. Tapi, poinnya di sini, poinnya di sini. Dalam rangka mengejar target realisasi investasi, ini kan kita juga diperhadapkan dengan pertanyaan etika dan moral investasi.

Kalau saya dalam posisi sebagai Pak Menteri Investasi, ada pertanyaan yang selewengan datang ke saya, “Pak Hendrik, jika anda sebagai Menteri Investasi, kira-kira investasi model apa yang Anda kehendaki masuk ke Indonesia?” Pak Menteri, menurut saya kita tidak sedang mengejar juga realisasi target yang sifatnya kuantitas investasi, tapi kita juga melirik investasi yang menurut saya itu investasi yang *responsible*, investasi yang bertanggungjawab, dan investasi yang etis juga.

Kita tidak mau pengalaman buruk yang terjadi di misalnya negara-negara Afrika hari ini, negara Asia Selatan hari ini, Srilanka dan sebagainya. Beberapa negara di Latin Amerika hari ini mengalami hal yang sama. Membuka pintu selebar-lebarnya, membuat relaksasi kebijakan negara senyaman-nyaman mungkin masuk investasi dari negara-negara besar. Apa yang terjadi sekarang? Manfaat investasi itu ampasnya saja yang dinikmati, kerusakan lingkungan saja dinikmati oleh negara tuan rumah. Tapi, manfaat

esensial dari investasi, yaitu nilai tambah, peningkatan kesejahteraan, alih teknologi, proteksi terhadap lingkungan itu tidak terjadi.

Nah, berkaca dari pengalaman negara-negara itu, Pak Menteri, saya minta dengan segala hormat kepada Pak Menteri, bahwa di samping target kita untuk merealisasi nilai investasi yang telah ditargetkan oleh Pak Presiden, tapi mungkin ada pentingnya juga kita untuk memperhatikan etika investasi. Nah, oleh karena itu, maka selain divisi pelayanan investasi yang telah disinggung oleh Pak Nusron tadi, saya minta divisi pengendalian itu penting sekali, Pak. Kita punya pengalaman berpuluh tahun membuka kesempatan investasi, reklamasi lahan tambang itu nggak pernah dilakukan, omong kosong itu *bullshit* itu.

Reboisasi hutan yang ditebang karena izin HPH atau HPI tidak pernah dilakukan. Kalau reboisasi itu dilakukan di pinggir-pinggir jalan saja. Sehingga, bisa terlihat oleh orang seolah-olah ada reboisasi. Tapi, reboisasi sebagai kewajiban menanam kembali itu tidak dilakukan. Oleh karena itu, divisi atau deputy pengendalian investasi ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa bukan cuma sumber daya alam kita dikeruk, tapi ada langkah-langkah ekologis yang bertanggungjawab, harus dilakukan untuk memulihkan kondisi alam dan bumi kita akibat dari investasi.

Saya kira itu pesan moral saya kepada Pak Menteri. Terima kasih, Pak Menteri. Abangku tersayang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Syalom untuk kita semua.

KETUA RAPAT:

Syalom.

Artinya, investasi yang berkualitas ya Pak Menteri ya. Selanjutnya, saya persilakan Pak Nyat Kadir, Pak Walikota.

F-P NASDEM (Drs. NYAT KADIR):

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

**Pimpinan yang saya hormati,
Bapak Ibu Anggota Dewan Anggota Komisi VI baik fisik maupun virtual,
Pak Menteri,**

Pak Menteri dengan dua jabatan. Selamat ya Pak. Ini kecil-kecil tapi bukan cabe rawit, kancil akalnya kancil.

Pak Menteri saya mau tanya ini ya. Ada dua realisasi, apa ini ya. Realisasi investasi tahun 2021-2022, ada dua alternatif ya. Di RPJMN 2020-2024 dengan arahan presiden. Jadi, yang 2. Pertanyaannya simpel sekali,

baik 2021 maupun 2022 Bapak lebih cenderung tercapainya yang mana. Ya di antara itu RPJMN dan arahan presiden itu.

Kemudian, pagu anggaran ya. Pagu anggaran ini, kita sedihlah ya. Targetnya besar, tapi anggarannya menurut saya kecil sekali ya. Tapi, ada usulan tambahan anggaran 608,5 miliar ya untuk tahun 2022. Kalau dipenuhi berarti lebih kurang 1,3 triliun ya. Untuk mencapai, mencapai, mancapai pagu angga, mencapai target 1.100 triliun. Saya membandingkan dengan tadi dengan BP Batam. BP Batam itu anggaran mereka itu 2,4 kalau tidak salah ya 2021, tapi targetnya 25 triliun ya. Nah ini, kecil sekali tapi targetnya besar sekali. Tapi, mungkin Bapak Presiden percaya dengan Bapak ya, kemampuan Bapaklah. Gak perlu banyak-banyaklah, dikit-dikit aja tercapai.

Yang ketiga terakhir, ini masalah pencapaian lapangan kerja ya. Bapak pernah ekspor kalau nggak salah di triwulan pertama ya, kuartal pertama di 2 19 triliun kalau nggak salah dengan target investasi 91 2021. Tapi, lapangan kerja cuma 311 ya Pak ya. Jadi, kalau kita kali lebih kurang dalam satu tahun target investasi 900 triliun itu cuma lebih kurang 1 koma sekian juta atau dua juta lapangan kerja. Saya membandingkan ini, yang diekspor oleh Pak Menko. Lebih besar capaian tenaga prediksi, capaian tenaga kerja, proyek strategis nasional, ya per tahun lebih kurang 4 juta agregat 2024 diperkirakan mencapai 16, 16 atau 19 juta. Ini apa bedanya itu.

Apakah karena proyek strategis nasional itu banyak padat karya atau karena Bapak ini, investasi formal ini padat modal. Lalu ada pembanding lagi, bapak sangat konsen dengan saya lihat dalam pembicaraan beberapa yang lalu lebih konsen kepada penyerapan tenaga kerja UMKM. 64 juta UMKM itu bisa menggaet lapangan kerja kalau nggak salah lebih kurang 116 juta orang. Jadi, UMKM itu lebih lebih tinggi ya Pak ya, penyerapan tenaga kerja, berarti rata-rata 1 orang aja per per ini per 1 orang UKM itu bisa menggaet minimal 2 orang saja sudah 120 tenaga kerja. Jadi, investasi yang besar tadi sampai 900 triliun itu, besar uangnya penyerapan tenaga kecil. Itu apa, itu saya mau bertanya itu apa. Apa sebabnya.

Saya kira itu aja, Pak Ketua tiga pertanyaan itu. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ya, terima kasih Pak Nyat Kadir. Selanjutnya, Hakim.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Terima kasih, Pimpinan,

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang hadir secara fisik maupun secara virtual,
Yang saya hormati Pak Menteri beserta seluruh jajaran Kementerian investasi atau BKPM,**

Prinsipnya Pak Menteri, pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran menyetujui. Karena memang, anggarannya juga tidak terlalu besar. Cuman di sini kami sedikit menyayangkan dari penambahan 608,5 miliar itu ada 15 *item* yang di *slide*-nya Pak Menteri ini tidak dijelaskan secara detail tiap *item* itu butuh berapa sih sebenarnya Pak penambahan anggarannya. Contoh 1, di poin 2 upaya peningkatan peringkat IODP 2022-2023. Satu, target dari Kementerian Investasi mau ke angka berapa. Kemarin atau tahun ini posisi kita di 73 atau 74 dengan penambahan anggaran ini tergetnya mau berapa. Seperti yang selama ini saya sampaikan di rapat kerja sebelumnya.

Kemudian, di poin 13, 14, 15, penguatan pengawasan pemeriksaan, penguatan sumberdaya, penguatan komunikasi informasi kementerian, dan Kementerian Investasi dan BKPM ini kan sudah kerja rutin, kerjanya udah lama, sudah terbiasa dengan ritme-ritme pekerjaannya. Nah, ini penguatan dan peningkatannya seperti apa sebenarnya, Pak Menteri. Karena, jangan sampai dengan anggaran yang terbatas, kemudian ada penambahan yang tidak signifikan pula, boros di beberapa sektor-sektor yang sebenarnya tidak perlu, sayang. Kami sayang dengan kementerianya *njenengan*, jadi jangan sampai anggarannya kecil, tergetnya besar tapi tidak bisa mengoptimalkan.

Saya rasa dua poin itu aja, Pimpinan. Maaf, terakhir.

Ketiga, di poin 10 pelayanan perizinan usaha mikro kecil dan menengah. Nah, kalau bisa difokuskan di poin 10 ini, Pak Menteri. Jadi, kami mendukung kalau Kementerian Investasi memang benar-benar men-*support* ya kan kemudahan-kemudahan UMKM dalam mendukung apa mendukung UMKM untuk perizinannya bisa cepat dan mereka bisa *skill up* nantinya.

Tiga poin itu, Pak Menteri. Terima kasih.

Assalamualaikum.

KETUA RAPAT:

Singkat padat jelas dan terukur. Ke virtual kita, Pak Idris Laena masih tampak. Pak Idris, kelihatannya masih. Sinyalnya mungkin karena di mobil saya lihat tadi.

Oke, kalau tidak ada lagi kita. Lho ke kesimpulan. Jawab dulu Bapak sedikit, ini main ke kesimpulan aja. Pak Menteri jawab dulu dikit Pak Menteri. Yang ada *highlight-highlight*, Pak.

F-P.GERINDRA (Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG):

Saya tadi daftar, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sorry, Pak La Tinro. Silakan, Pak La Tinro.

F-P.GERINDRA (Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG):

Makasih, Pimpinan

**Yang saya hormati bersama seluruh teman-teman Anggota Komisi VI,
Baik yang secara virtual ataupun yang fisik,
Pak Menteri bersama seluruh jajaran yang saya hormati,**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang pertama Pak Menteri, bahwa di dalam Kementerian BKPM, itu saya kira tidak ada masalah kalau mengurus NIB itu, semua mengatakan sangat baik melalui OSS.

Yang kedua, tadi pada pagu indikatif juga ada masalah pelayanan penanaman modal yang kurang lebih 106 miliar, dikaitkan dengan 7 KPI pada halaman 4 mendorong investasi peningkatan, mendorong peningkatan investasi dalam negeri. Ini yang perlu saya sampaikan kepada Pak Menteri, karena dari Kementerian Investasi ini kan bukan sebagai eksekutor berada pada Lembaga atau Kementerian yang lain. Nah, di situlah terjadi *problem*, Pak Menteri. Artinya apa, di sana pengurusan-pengurusan izin apa pun yang dikeluhkan oleh pengusaha-pengusaha yang ingin investasi dalam negeri sangat-sangat sulit. Orang banyak mengatakan bahwa kenapa dipermudah kalau bisa dipersulit, ini akan menjadi *problem*. Sedangkan, Bapak selalu ingin mendorong investasi dalam negeri menjadi lebih baik, banyak investasi dalam negeri, tetapi Bapak bukan sebagai eksekutor.

Harapan kami adalah apabila Bapak sudah melihat ada investasi, investor yang ingin berinvestasi di dalam negeri, mohon Pak. Kalau koordinasi-koordinasi ini dilakukan dengan kementerian lembaga yang lain, artinya apa. Diharapkan kementerian ini bisa memberikan informasi kepada pengusaha-pengusaha dalam negeri untuk dikawal dengan kementerian yang lain. Apa yang terjadi, banyak pengusaha Pak banyak pengusaha mengeluh. Ada yang izinya sudah puluhan tahun tidak bisa keluar. *Problem* yang pertama yang ada di sana adalah aturan-aturan selalu berubah. Sudah memutuskan aturan yang lain, berubah lagi aturan yang lain. Orang sudah menyiapkan seluruh berkasnya, berubah lagi aturan yang lain bahkan ada keputusan menteri, bayangkan Pak, dianulir oleh keputusan direksi. Ini kan ada saya bisa perlihatkan sama Pak Menteri bagaimana keputusan menteri itu dianulir oleh sebuah keputusan direksi. Ini kan menjadi *problem* semua.

Nah, harapan-harapn orang-orang semua Pak yang ingin investasi dalam negeri, tolong investasi kementerian ini muncul untuk bisa memberikan juga pelayanan, bisa melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang lain. Sehingga, investor mereka itu tidak dipersulit dan kita juga bersyukur

bahwa sudah ada Undang-Undang Cipta Karya, mungkin ini akan lebih baik. Sehingga, tidak lagi aturan nanti ada tumpang tindih, tidak lagi aturan selalu berubah-berubah. Ini kan suatu kesempatan untuk investor dalam negeri. Harapan satu-satunya adalah mohon kementerian ini bisa selalu melakukan koordinasi dengan kementerian yang lain sebagai kementerian yang mengeksekutor suatu izin, bisa dipermudah dan bisa dipercepat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi, efektif efisien dari pada Undang-Undang Cipta Kerja ini yang kemudian tanggungjawabnya sebagai eksekutor adalah Pak Menteri Investasi tentunya lebih banyak, sehingga ini menjadi sorotan dari teman-teman dan kemudian diharapkan juga satgas ini mampu menerobos daripada raja-raja kecil yang di daerah itu, Pak yang berkuasa sehingga.

Kalau saya dengar dari tadi ini banyak yang berbicara tentang itu. Pak Menteri mungkin walaupun kita berbicara tentang anggaran, mungkin Bapak Menteri jawab sepiantas tentang satgas ini dan cara menerobos pemerintah, raja-raja kecil yang di bawah ini. Karena, saya juga sempat mengalami ini. Jadi, apa kita sudah siapkan semuanya. Investasi mau masuk, hanya persoalan rekomendasi di bawah, tempatnya juga sudah ada, rekomendasi di bawah ini ditunda-tunda dan apa yang disampaikan Pak siapa, Pak La Tinro tadi dan rekan-rekan yang lain, termasuk juga satgas ini nanti berkoordinasi tidak hanya kepada kementerian, tentu dengan lembaga yang lain, ada kepolisian barangkali yang bisa diajak berbicara tentang siapa-siapa yang menghambat bahkan kejaksaan, siapa-siapa yang membuat daripada investasi ini.

Jadi, besar harapan kita kepada Pak Menteri. Ya *government spending* sudah banyak dikeluarkan, ada yang di helikopter *money*, uang sebar begitu aja kaya BPUM itu untuk meningkatkan daya beli dan kemudian yang di faktor (I) nya itu, investasinya tentu tugas tanggung jawab daripada BKPM yang tadinya kurang kewenangan ditambah kewenangannya, sehingga bisa lebih leluasa bergerak.

Silakan, Pak Menteri. Karena, tadi Pak Idris sudah tidak, tidak ada sinyal. Jadi, silakan Pak Menteri langsung.

MENTERI INVESTASI/BKPM:

Baik, terima kasih,

**Pimpinan,
Bapak Ibu Anggota Komisi VI yang saya hormati,**

Pertama, terima kasih Pimpinan, karena sekalipun banyak pertanyaan, tapi lebih mengkerucut pada persetujuan untuk satu perjuangan dalam rangka

menambah anggaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan, itu dulu barangkali yang saya ucapkan terima kasih.

Yang kedua, saya akan menjawab secara umum, nanti detailnya nanti akan dijawab secara tertulis. Pertama, saya bicara tentang sistem pelayanan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Bapak Ibu semua yang saya hormati,

Apa yang Bapak Ibu rasakan tentang izin di daerah susah dan putar-putar itu juga yang saya rasakan ketika pertama saya jadi pengusaha. Kadang-kadang kewenangan bupati itu sama dengan orang yang pegang cap surat dan nomor surat. Kadang-kadang bupati sudah *taken* surat, tapi yang pegang cap surat lagi pulang ke kampungnya karena mamanya sakit. Jadi, *taken* bupati itu nggak bisa dipakai. Kadang-kadang cap surat sudah ada, tapi ada satu oknum pegawai yang dia pegang nomor surat. Jadi, nomornya belum bisa dikeluarkan. Nggak jadi juga itu barang. Ini adalah potret dari sebuah sistem birokrasi di negara kita yang kita cintai bersama-sama. Pertanyaan berikut adalah apakah ini kita menyalahkan siapa. Saya pikir tidak perlu kita menyalahkan siapa-siapa, tapi mari kita mulai tabir yang baru.

Bagaimana tabir yang baru, Undang-Undang Cipta Kerja itu kan tujuannya salah satu di antaranya adalah bagaimana dunia usaha mendapatkan kepastian, perizinan, kemudahan, efisiensi dan transparansi. Di mana cantuman pasal itu, di Pasal 174 Undang-Undang Cipta Kerja dikatakan bahwa, kewenangan gubernur, bupati, kementerian lembaga dalam konteks izin dimaknai sebagai kewenangan presiden yang dilimpahkan pada mereka. Di poin berikutnya dalam rangka penataannya dibuat NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria). Kemudian, dijabarkan dalam PP Nomor 5 yang sudah keluar, Pak. PP Nomor 5 tentang perizinan itu dimasukkan bahwa seluruh perizinan itu berbasis elektronik dan via OSS. Pertanyaan berikut adalah sudah sejauh mana ini OSS, kira-kira kan begitu.

Jadi begini Pak, seluruh perizinan di 18 kementerian lembaga itu nanti semuanya via *online* dan Kementerian Investasi yang akan *taken* seluruh perizinannya atas nama kementerian lembaga. Sementara untuk gubernur bupati, itu perizinannya di-*taken* oleh DPMPTSP, itu di PP Nomor 6. DPMPTSP, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dinasnya Kementerian Investasi. Biar agak keren dikit begitu, bahwa Kementerian Investasi ada dinasnya. Jadi, mereka yang akan *taken* atas nama bupati dan gubernur.

Bagaimana metodenya agar hal-hal yang seperti tadi tidak terjadi. Pimpinan, dulunya itu tidak ada namanya fiktif positif. Jadi, kalau seandainya contoh diizin lokasi, Pak di kabupaten A, sekaligus jawaban kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di daerah, senior-senior saya ini. Kalau bupati di dalam NSPKnya 10 hari untuk izin lokasi, kemudian dalam 10 hari tersebut seluruh persyaratannya sudah dipenuhi, lalu kemudian oknum bupatinya tidak mengeluarkan karena ini lawan politik, contoh kan bisa begitu. Di daerah banyak pencak silat begitu, Pak.

Maka, yang dipakai adalah fiktif positif. Maka, izin itu bisa dikeluarkan masuk Lembaga OSS dan pengelolaannya bisa *taken* atas nama bupati itu. Begitu pun yang terjadi pada kementerian lembaga, contohnya, contohnya di dalam NSPK ada yang 10 hari, ada 20 hari, ada. Di NSPK itu PP dan *ndak* bisa kita, *ndak* bisa permen, *ndak* bisa pergub membuat gerakan tambahan di luar daripada PP. Ini semua kita lakukan agar nggak boleh gerakan pencak silat yang melahirkan ketidakpastian, Pimpinan.

Nah sekarang, pembangunan *develop* aplikasinya sedang berjalan sekarang, sudah mulai tes uji coba-uji coba. Ada beberapa permen yang belum selesai, Pimpinan termasuk Menteri Pendustrian punya permen belum selesai, Pimpinan. Nah, ini Pimpinan punya satu rumah juga, jadi saya harus sampaikan Pimpinan. Jadi, jangan sampai ini lambat gara-gara, karena dari 300, 300, *sorry* 3.767 KBLI masih ada 2.000 KBLI yang belum *clear* dan dari 2.000 KBLI yang belum *clear* itu adalah 1.369 KBLI di Menteri Perindustrian.

Biar Pimpinan, karena saya di tanyain maka saya, kalau saya kan orang timur Pimpinan. Tidak boleh antara mulut dan hati berbeda nanti ketahuan bohongnya saya, Pimpinan. Karena, muka kita ini sudah standar, jadi jangan lagi ungkapan kita standar, nanti nggak ada lagi kelebihan kita, Pimpinan. Jadi, mohon maaf saya harus ngomong ini Pimpinan apa adanya.

Tadi sama dengan Pak Lewarissa tadi, ini abang saya, jadi tahu betul dan kita ini kan bukan tipekal orang yang membuat orang menyanjung-nyanjung orang, kita ini udah terbiasa dengan apa adanya. Jadi, kalau bagus bilang bagus, kalo nggak bagus bilang bagus, daripada habis itu ditagih utang gitu.

Itu yang menyangkut dengan izin, Pimpinan. Jadi, sekarang, *insya* Allah tanggal 2 Juli, *live*. Tapi, ini harus ada kinerja apa kerja, 2 Juli sudah *live*, sudah *test case* sekarang, ON-nya langsung dipergunakan 2 Juli dengan catatan, Pimpinan KBLI dari kementerian-kementerian yang masih ada 2.000 lebih itu bisa masuk segera. Karena, begitu masuk kan langsung di-*develop* dulu di aplikasi, Pimpinan. Kalau terlambat masuk, terlambat lagi itu *develop* dan saya sudah melaporkan ini kepada Pimpinan kami bahwa ini ada kondisi seperti ini. Karena, ini adalah hilir dari instrumen yang banyak Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi, *insya* Allah.

Kemudian yang kedua, abang La Tinro. *Sorry* mohon maaf, Pak La Tinro ini senior saya. Saya memang kadang-kadang Pak, *sorry* ini biasa dulu kita masih aktifis sering menghadapi juga soalnya. Jadi, lidah ini masih, masih agak terbawa-bawa, Pak La Tinro. Mohon maaf, Pak. Memang, diperizinan ini ada dua Pak. Ada perizinan yang medomain pemerintah dan ada perizinan yang bukan domain pemerintah, tapi kaitannya dengan institusi-institusi ekonomi, seperti BUMN. Kalau itu di BUMN, Pak kita susah untuk masuk mengintervensi.

Contoh, ini mohon maaf dengan segala hormat. Teman-teman saya di HIPMI, itu banyak meminta contoh katakanlah minta bantuan difasilitasi agar

mereka bisa masuk penyuplai batu bara di PLN atau mereka membangun *power plant*, tapi listriknya diterima oleh PLN, ini contoh ya Pak, ini contoh. PPA atau konsesi itu pemerintah nggak bisa masuk di situ. Nah, rata-rata dulunya katakanlah disuruh bikin *power plant*, disuruh beli batu bara, izinnya semua sudah oke, *deal* bisnisnya nggak jalan.

Ini yang paling banyak dan itu termasuk saya sendiri juga dulu begitu. Saya jujur aja waktu saya masih jadi Ketua Umum HIPMI, begitu saya mau masuk untuk mempunyai *power plant* 20 Mega aja agar kita orang daerah punya *power plant*, disuruh kerja sama sama anak perusahaannya, sahamnya 50% tanpa *equity*. Saya bilang, ini kerja bagaimana ini, itu contoh saja, tapi nggak apa-apa mau dibesarkan juga nggak papa, itu faktunya kok. Kita kan tidak boleh lagi ada dusta diantara kita kan.

Itu kondisi menyangkut dengan perizinan. Menyangkut dengan satgas, Pimpinan. Satgas ini.

ANGGOTA KOMISI VI:

Pimpinan, Pimpinan. Saya mau dalam sedikit boleh nggak ini. Dikit aja. Interaktif aja. Pak *anu*, Pak Menteri, diantara itu saya agak ragu tadi izin lokasi itu. Kan banyak masalahnya di sandera di tanah oleh rakyat atau ganti rugi segala macam bagaimana menyelesaikan, menyelesaikan itu supaya cepat dalam hitungan berapa hari tadi.

MENTERI INVESTASI/BKPM:

Izin pimpinan.

Tadi saya kasih contoh seperti izin lokasi, contoh harinya. Saya belum membaca NSPK-nya berapa hari kalau izin lokasinya. Biar saya tidak dikejar kalau seandainya ngomongan saya keliru, kita sepakati aja contoh mungkin 10 hari. Contoh di Kabupaten Maluku Tengah. Pak Hendrik mau bangun pabrik. Izinnya di Kabupaten Maluku Tengah di Kecamatan Way. Semua persyaratan tanahnya 1 hektar sudah terpenuhi. Kewenangan untuk izin lokasi itu di Pemda Kabupaten, tetapi bupatinya belum meng-oke kan, padahal semua syaratnya sudah oke. Karena, Pak Hendrik bukan orang yang mendukung bupatinya, contoh ini. Sampai 10 hari kemudian tidak ada *approve* lewat aplikasi OSS, maka itu ditarik ke pusat, itu yang namanya fiktif positif dan itu sesuai dengan PP Nomor 5 dan sesuai dengan PP Nomor 6.

KETUA RAPAT:

Ini bagus ini untuk kita sosialisasi nanti di.

MENTERI INVESTASI/BKPM:

Ini bagian pada materi sosialisasi Anggota DPR Komisi VI, Pak. Kita udah siapin barang ini. Supaya mereka tahu bahwa kolaborasi Kementerian

Investasi sama Anggota DPR Komisi VI ini kan untuk memberikan kepastian, Pimpinan.

Nah, soal lain kalau izin lokasi belum dikasihkan, karena tanahnya belum bayar, Pak Hendrik belum bayar. Itu soal lain lagi, Pak. Jadi, kita juga nggak bisa serta-merta memberikan izin, tapi hak rakyat nggak kita selesaiin. Itu nggak *fair*. Nggak bisa Pak, itu harus *clear* dulu terkecuali di kawasan PSN atau di kawasan industri, itu boleh. Kalau PSN itu kan dikuasai dulu, pembayarannya menyesuaikan dengan harga yang sudah disepakati, tapi kalau bukan di kawasan itu, maka *clear and clean* dulu.

Iya, iya, mohon maaf Pak kalau mau cepat hukum ekonomi terjadi, kalau mau cepat maka selesaikan lahan dulu. Contoh, mohon maaf Pak kalau Pak Hendrik mau bangun di lahan saya, Pak Hendrik bilang, “Udah Pak Bahlil utang dulu”. Saya nggak mau hutang, Pak Hendrik. Pak Hendrik bayar dulu baru saya kasih rekomendasinya, kira-kira begitu Pak.

F-P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.):

Pak Pimpinan, informatoris aja informatoris Pimpinan.

Memang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu di antara 11 *cluster* yang diatur di situ, ada satu *cluster* Pak Nyat Kadir yang namanya pengadaan lahan. Nah, kita semua tahu bahwa tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini kan tujuannya adalah mempercepat investasi, melakukan relaksasi peraturan perundang-undangan dan yang ketiga itu adalah apa yang ketiga tujuan itu Pak, satu, dua, peningkatan investasi, peraturan dan proteksi ketenagakerjaan.

Nah jadi, memang negara lewat instrumen kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu sudah memikirkan soal perlunya percepatan pembebasan lahan itu, Pak. Kan juga ada undang-undang tentang penggunaan tanah atau untuk kepentingan pembangunan, itu juga ada. Jadi, ada cara yang harus ditempuh, sehingga jika pembebasan lahan itu harus tidak mesti menjadi penghalang untuk investasi ya. Kalau pembebasan lahan masih menjadi penghalang untuk investasi, apa gunanya Undang-Undang Cipta Kerja itu. Nggak ada gunanya.

Saya kira demikian, Pimpinan.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Pimpinan, Pimpinan sedikit.

Pak Menteri, ketika sudah *clear and clean* tadi, udah jalan 10 hari kemudian ditarik dipusat kan. Nah, ketika sampai di pusat butuh berapa hari biasanya?

MENTERI INVESTASI/BKPM:

Saya jawab sekaligus aja yang sama Pak Hendrik tadi. Ya, rohnya sama rohnya sama Pak Hendrik. Jadi, ada 2 saya baru baca ini. Jadi, izin lokasi diganti dengan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, namanya PKKPR. SOP-nya 20 hari berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021, 20 hari.

Ini Pak ini. Memang luar biasa ini deputi saya ini, bisa ini Pak. Begitu bagus, Pak. Nanti Bapak tambah lagi, tapi nggak ada lagi di atas itu nomor satu. Cuman itu aja. Kalau Bapak mau ganti saya harus lobi dulu sama presiden. Tapi, saya senang kalau langsung dikasih begini.

Nah, caranya begini Pak. Biasanya *clear and clean*. *Clear and clear* itu, satu adalah memang ada kesepakatan mungkin sekalipun belum lunas, tapi ada kesepakatan pemilik tanah dan investor. Tetapi, kalau di PSN atau di kawasan industri, *clear, no problem*, nggak ada masalah. Ini cepat, jadi ada dua pola. Kalau tidak salah, kalau harga itu apa namanya KBBJP kalau tidak salah ya, kalau PSN masih, masih, masih, masih, Pak.

Oh ya Pak, harganya nanti gini Pak. Harganya itu nanti saya jelaskan di 1-4 tentang kawasan industri. Rata-rata kenapa Kawasan Industri kita nggak laku, seperti tadi Bu Evita tadi bilang. Itu karena kawasan kita ini bukan Kawasan Industri untuk membangun produk yang lebih efisien, tapi sudah menjadi kawasan industri tanah. Jadi, dimaknai seperti orang mau bangun kawasan properti, Pak. Jadi, bukannya kita membentuk kawasan percepatan untuk izin supaya *clear and clean*, tapi kita sudah mengambil untung di muka, Pak. Ini yang paling rusak, Pak.

Itulah kenapa ini kawasan ekonomi kita ini. Saya sudah keliling. Begitu kita di lantik jadi Menteri Investasi Pak, saya sudah hampir semua datang, Pak termasuk di Semangke, Pak. Beda dengan kawasan industri yang kami bangun di Batang, Pak. 9 bulan Pak kami sudah bangun 450 hektar, itu sudah selesai laku terjual habis dan satu perusahaan kemarin sudah *ground breaking*. Kenapa, tanahnya murah. Jadi, bukan tanahnya kita ambil untungnya, tapi negara itu mendapatkan dari proses hilirisasi nya, produknya, ini Pak.

Terus dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mas Hakim. Pak Hakim mohon maaf. Ini, iya, iya, iya, nanti kita bisa kacau soalnya, memang kadang-kadang kita main-main ini tapi parlemen soalnya.

Begitu 20 hari ditarik, saya katakanlah tarik hari ini besok keluar. Karena, otomatis tuh. Tidak perlu, karena itu apa via aplikasi OSS. Jadi, bukan diverifikasi lagi. Karena, di situ fitur-fiturnya semua sudah ada. Kita nanti pengin Pimpinan begitu OSS ini sudah siap, kita akan mengundang utusan dari Komisi VI untuk kita peragakan pertama di Kementerian Investasi, Pimpinan. Agar lebih dekat kalau bahasa saya waktu masih muda itu, tak kenal maka tak sayang, Pimpinan. Kira-kira seperti itu menyangkut aplikasi.

Saya pikir menyangkut dengan yang lain-lain, menyangkut satgas *sorry*. Karena, satgas itu begini, satgas ini sampai di kabupaten kota, Pak. Jadi, nanti ada Korwil, jadi di pusat itu ketuanya adalah Kementerian Investasi, Wakilnya adalah Wakil Jaksa Agung, Wakilnya adalah Wakapolri, itu Keppres Nomor 11. Jadi, ini bukan satgas yang dibentuk oleh Kementerian Investasi. Tapi, inilah satgas yang dibentuk oleh bapak presiden lewat Keppres. Tujuannya apa, hanya 4 dalam keppres itu.

Menyelesaikan *debottlenecking*, yang kedua adalah mencari potensi investasi yang bisa meningkatkan devisa dengan cepat, yang ketiga memastikan kolaborasi dengan pengusaha nasional dan UMKM dengan investor agar mereka tidak lari-lari, Pak. Karena begini, namanya investor ini Pak, kita ya sebagian pernah jadi pengusaha termasuk saya. Ciri dara keinginan monopoli itu tinggi, Pak.

Kalau pemerintah tidak mengintervensi lewat regulasi untuk membuat mereka kolaborasi, susah untuk mereka itu secara ikhlas memberikan. Caranya bagaimana, di saat mereka meminta izin, di saat mereka meminta insentif, di saat mereka meminta bantuan dari peran negara, maka situ negara menawarkan agar tolong akomodir ini sebagai bentuk pemerataan untuk menciptakan kelas menengah dari UMKM menjadi menengah, menengah menjadi besar dan kita perluas agar dunia usaha jangan hanya dikuasai itu-itu saja dan ini pada korwil-korwilnya Pak. Ada korwil, ada kapolda nanti, kemudian kajati akan turunkan juga sampai di kabupaten kota.

Jadi, tugasnya adalah menyelesaikan masalah-masalah. Yang tidak bermasalah jangan kita sentuh

KETUA RAPAT:

Jadi, di atasnya itu ada Pak Menteri beserta waka polres sama wakajati. waka

MENTERI INVESTASI/BKPM:

Wakil Jaksa Agung.

KETUA RAPAT:

Wakajau, Wakagung.

MENTERI INVESTASI/BKPM:

Saya juga memang kadang-kadang lupa, Pak. Kadang-kadang wakil jaksa agung saya rubah menjadi, ya karena kita orang daerah soalnya, jadi lebih mirip.

KETUA RAPAT:

Jadi, di bawahnya itu begitu juga susunannya atau?

MENTERI INVESTASI/BKPM:

Tidak *automatically*, tidak *automatically*. Tapi, kalau di daerah untuk korwil ada beberapa satgas-satgasnya kami bentuk itu dari dunia usaha. anggotanya itu adalah kapolda, kemudian Kajati.

Jadi tidak mesti, Pak Pimpinan juga kalau memang ingin berkontribusi kepada rakyat, bangsa dan negara bisa kita jadikan sebagai satu kesatuan dalam konteks pengabdian dan kesejahteraan rakyat bersama Pak Pimpinan.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Pak Menteri, dikit.

Satgas investasi, itu pelaporannya ke langsung ke Pak Menteri nanti.

MENTERI INVESTASI/BKPM:

Pak Presiden.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Nggak, nggak kalau misalnya ternyata di daerah kami, di dapil kami.

MENTERI INVESTASI/BKPM:

Langsung ke saya.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Langsung ke,

MENTERI INVESTASI/BKPM:

Langsung bisa. Karena, ada devisi-devisinya. Nanti, sekretariatnya ada di Kementerian Investasi.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Atau *direct* ke Pak Menteri gitu ya.

MENTERI INVESTASI/BKPM:

Bisa, bisa, kalau Komisi VI bisa langsung ke saya aja nggak papa.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Oke.

MENTERI INVESTASI/BKPM:

Itu saya secara seksama.

Saya pikir Pimpinan, menyangkut dengan urusan hal-hal dan lain-lain. Pak Nusron yang terhormat, kebetulan di dalam undang-undang itu aturan tidak boleh dana APBN dipakai lagi untuk tugas belajar, betul ya Pak Yulio? Kemarin saya dikasih tahu. Yang bisa itu memakai dana LPDB. Jadi, orang-orang di BKPM ini Pak, itu hampir semua itu sudah sekolahnya di luar negeri untuk S2-nya dan S3-nya.

Menteri Investasinya aja yang produk local, Pak. Jadi, nggak ada masalah juga dan sekolah keluar ini kan nggak juga menjamin bisa menyelesaikan masalah. Aku kadang-kadang bingung juga harus di keluar. Sebenarnya, ini ilmu pencak silat di lapangan ini. Jadi saya pikir, kita jangan terlalu terpaku juga bahwa untuk menyelesaikan masalah bangsa ini harus tamatan luar negeri. Tamatan luar negeri penting, tetapi memahami masalah dalam negeri jauh lebih penting untuk diselesaikan.

F-P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.):

Pak Pimpinan, saya kira saya tambah sedikit, Pak Menteri.

Artinya, terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Nusron tadi itu, itu kan sebenarnya gambaran dari kegelisahan banyak orang. Jadi, bukan soal SDM itu memiliki kompetensi teknis yang bagus, entah dia lulusan luar negeri atau lulusan dalam negeri, entah lulusan S1, S2 atau S3. Tapi, bukan soal kompetensi teknis yang, yang menjadi faktor determinan, tapi soal perilaku sebenarnya, soal etika, soal karakter.

Dia boleh saja lulusan SMA, tapi kalau karakternya itu karakter melayani, lebih baik lebih bagus kontribusi dia untuk mendorong investasi, dibandingkan seorang lulusan Amerika atau Eropa yang berkarakter kurang, bukan karakter melayani. Ini infonya di situ, Pak Menteri. Jadi, apa pesannya, pesannya adalah tentu lewat percontohan, Pak Menteri sebagai *the Boss* atau *the Leader of the Ministry*, ya tentu menjadi ya *Ing Ngarso Sung Tulodo* lah, Pak kalau level pimpinannya bisa menjadi contoh. Saya yakin pasti aparaturnya dibawa juga akan mengikuti.

Saya kira demikian, Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya setuju juga, karena banyak juga yang sukses dalam memimpin perusahaan dan apa investasi, banyak yang malah gagal di sekolahnya. Facebook, segala macam kan bosnya banyak yang gagal di sekolahnya, termasuk Einstein katanya gagal dulu di sekolah.

Saya setuju, saya setuju itu yang penting tidak hanya kepintaran kan kolaborasi antara cerdas, intelektual, emosional *question* dan spiritual *question* itu harus berimbang gitu ya.

Silakan, Pak Menteri.

MENTERI INVESTASI/BKPM:

Saya setuju, Pimpinan. Narasi yang disampaikan oleh senior saya tadi, Pak Lewerrisa tadi itu. Sedikit pun saya tidak berbeda, cuman saya setuju sekali. Rohnya ke sana, bukan jadi dan sekedar catatan di sekarang di kita baru pulang itu 113 orang S2 dan saat ini masih ada 10 orang lagi di luar negeri. Jadi, *alhamdulillah* bisa berjalan semua.

Saya pikir Pimpinan, menyangkut dengan investasi yang berorientasi pada prioritas sektor-sektor prioritas kita lakukan. Hal-hal dan lain-lain kita atur dalam jawaban tertulis.

Pimpinan, saya tidak takut melanggar Pimpinan. Jadi, sudah sesuai dengan apa yang disepakati. Demikian, Pimpinan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh,
Syalom,
Om Santi Santi Om,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan,

KETUA RAPAT:

Om.
Wassalamualaikum.

MENTERI INVESTASI/BKPM:

Oh, yang mana Pak? Oh, Pimpinan sebentar Pimpinan.

Saya tenaga kerja, karena sudah di langsung di-*veto* lagi. Gini Pak, lapangan pekerjaan dari total investasi kita 825 triliun di tahun 2020, itu menyerap tenaga kerja langsung itu sekitar 1 juta, kurang lebih sekitar 1 juta dua ratus, itu tenaga kerja langsung. Dua ribu dua puluh, 2020.

Kemudian, di tahun 2021 pada kuartal pertama dengan realisasi investasi 219 triliun, itu mampu menyerap tenaga kerja kurang lebih sekitar 300 lebih ya, 311.000.

Pertanyaan berikut adalah bagaimana perbandingan dengan apa yang disampaikan oleh Menko, kira-kira kan begitu Pak. Saya kalau ditanya

perbandingan Kemenko, mohon maaf Pak. Mungkin, nanti ditanyakan kepada Kemenko, tetapi kalau kami. Itu berbasis data lewat LKPM.

Saya tidak bisa menguraikan Pak tentang apa yang dipersepsikan oleh Menko, tapi saya hanya menjawab apa yang kami menyajikan data bahwa kami punya data itu bukan survei, bukan angka juga pakai rumus regresi, tapi dia adalah *by* laporan LKPM, per perusahaan dan itu fakta dapat dipertanggungjawabkan baik nama perusahaan, lokasi, proyek dan tempat.

Demikian, Pimpinan. Terima kasih.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Pimpinan, sedikit Pimpinan.

Sorry tadi lompat ada tamu di atas.

KETUA RAPAT:

Pak, kita ini jam setengah 8, tapi kalau, sebentar ya Pak.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Sebentar aja, nggak apa-apa. Santai aja. Kayak dunia mau kiamat aja kita ini.

Nggak, saya hanya sedikit saja, ini kan soal KPI ini loh, Pak Menteri ya kan. Enggak, kan, saya kemarin juga sudah minta di detailkan. Jadi, sebenarnya targetnya seperti apa. Dulu kan kita sama-sama MBA, belajar MBO itu, Pak Menteri. *MBO Management By Objective*, itu dirakor kan Pak Menteri, ingatlah kita yang saya nyontek sama abang, ya kan.

Nah, ini targetnya objektifnya seperti apa. Tolong di-*detail*-kan supaya kami tahu, Pak. *Is of doing business*, perbandingan PMDN dan PMA, UMKM gampanglah Bang, ini angka-angka ini di-*detail*-kan pada kita. Hanya itu aja, agar kita tahu nanti di akhir tahun, di awal tahun sampai nggak nih target nih. Walaupun, saya tahu anggarannya kecil ya, tapi itulah kita minta di-*detail*-kan. Hanya itu Pak ya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, penting. Iya KPI iya penting itu.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Sama Pak satu lagi. Pak, kalau kami mau tahu proyek-proyek yang mangkrak misalnya. Itu di siapa tahunya, Pak. Di investasi Indonesia yang

mangkrak, misalnya PLTG Pak, yang mangkrak di mana. Saya mau tahu di mana, siapa, ke mana Pak gitu.

KETUA RAPAT:

Oke, nanti jawab tertulis Pak ya. Oke.

Silakan, Pak Menteri ada lagi? Cukup?

MENTERI INVESTASI/BKPM:

Pimpinan, terima kasih dari Pak Prof. Nanti habis ini saya setengah kamar sama Prof.

KETUA RAPAT:

Nah itu.

MENTERI INVESTASI/BKPM:

Yang mangkrak itu setengah kamar, yang penjabaran KPI sebenarnya sudah pernah kami jabarkan, tapi kalau Pak Prof karena mungkin banyak apa laporan dari muridnya terlalu banyak, sehingga lupa. Jadi, sebagai murid yang baik akan selalu memberikan penjabaran kepada Pak Prof.

Nanti, Pak Julio paling lambat hari jumat sudah masuk ke Pak Prof, kalau tidak nilai kita bisa turun dari KPI yang ada dan habis ini saya akan ketemu Pak Prof. Kita kan sudah janji, Prof. Hari ini Kamis kan Prof, Kamis malam kan ya. Jadi, setengah kamarnya Kamis malam.

Oke, makasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ini biar nggak ngantuk aja, ini udah jam 4 ini. Dari pagi saya tadi mimpin dari pagi Pakde Hekal mimpin sebentar, trus tinggalin. Jadi, saya mimpin dari pagi dan jam 4 ini.

Bukan, saya ini kalau ada yang tidak hadir lagi kebutuhan. Sangat nyaman nggak di Komisi VI katanya. Sangat nyaman nggak di Komisi VI katanya.

MENTERI INVESTASI/BKPM:

Pimpinan, kalau ada nilai di atas nyaman, nah itulah kami di BKPM di atas itu, Pimpinan. Jadi, kalau ditanya nyaman, pasti. Tapi, kalau masih ada diatas nyamannya, nah posisi Menteri Investasi disitu, Pimpinan.

Jadi, jangan sampai ada ada satu perencanaan untuk pindah. Karena, saya tahu ini lagi pindah-pindah ini barang ini. Jadi, ini bulan-bulan raja pindah, Pimpinan. Jadi, kalau bisa di sini aja.

KETUA RAPAT:

Kita berteman di sini lebih apa situasinya lebih mantap lah, suasananya lebih apa lebih cerah, lebih cair. Ya, maka dari itu saya lebih banyak *joke-joke* juga, karena Pak Menteri suka *joke*, jadi saya *joke-joke* juga gitu loh.

Oke, kita cukup pada kesimpulan ya. Tayangkan kesimpulan. Jadi memang, memang ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab *online*, ada yang jawab *offline* gitu.

Oke ya, *draft* kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPRRI dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkait pembahasan RKP dan RKA K/L Tahun 2022. Selasa, 8 Juni 2021.

Satu, Komisi VI. Ada perintah Pak Erick, Hendrik?

F-P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.):

Silakan, dibaca dulu Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

1. Komisi VI DPRRI menerima penjelasan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM terkait anggaran berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas Nomor S-361/MK.02/2021 dan B238/M.PPN/D.8/PP. 0402/04/2021 tanggal 29 April 2021, telah ditetapkan Pagu Indikatif Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp711.513.546.000,- (*Tujuh Ratus Sebelas Miliar Lima Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Tolong dikoreksi kalau angkanya salah ya

Terdiri atas:

- a. Program dukungan manajemen sebesar Rp300.901.232.000,- (*Tiga Ratus Miliar Sembilan Ratus satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- b. Program penanaman modal sebesar Rp410.612.314.000,- (*Empat Ratus Sepuluh Miliar Enam Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*).

Terus naikin *dong*, naikin *dong*. Nah, setuju Pak Menteri? Angkanya udah bener ya? Ini biasanya yang belakang-belakang itu yang ngerti angkanya. Udah bener ya, cocok angkanya.

(RAPAT:SETUJU)

2. Komisi VI DPRRI mendukung pengajuan usulan tambahan anggaran Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp608.500.000.000,- (*Enam Ratus Delapan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Setuju ya.

(RAPAT:SETUJU)

3. Komisi VI DPRRI akan membahas masing-masing program secara detail dalam Rapat Dengar Pendapat atau RDP.

Setuju ya.

(RAPAT:SETUJU)

4. Komisi VI DPRRI memberikan waktu kepada Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lama 10 hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPRRI.

Setuju ya.

(RAPAT:SETUJU)

Terus habis ya. Cukup ya oke. Cukup ya.

Terima kasih kepada rekan-rekan Komisi VI baik yang *offline*, maupun yang *online* yang dengan seksama dan penuh perhatian termasuk juga memberikan masukan-masukan yang tentunya konstruksi kepada Pak Menteri Investasi dan sekaligus mendukung apa-apa yang telah menjadi usulan dari Pak Menteri Investasi tentang anggaran. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih, begitu juga Pak Menteri. Terima kasih atas penjelasannya dan kehadirannya di Komisi VI yang begitu bersemangat menerangkan apa-apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di Anggota Dewan.

Untuk itu saya akhiri rapat pada sore hari ini dengan mengucapkan,

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syalom,

Om Shanti Shanti Shanti Om.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.21 WIB)

JAKARTA, 8 JUNI 2021
a.n KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

DEWI RESMINI, S.E., M.Si.
NIP.197104071992032001